

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DENGAN PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (PERIODE 2017-2021)**

TESIS

Oleh

**IFATURRAHMI
18801019**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DENGAN PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (PERIODE 2017-2021)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh

**IFATURRAHMI
18801019**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

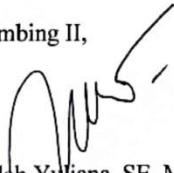
Tesis dengan Judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021)”**, setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I,



Dr. H. Misbahul Munir, M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

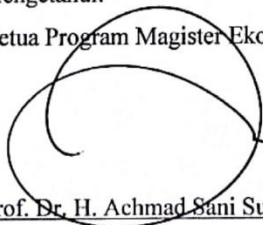
Pembimbing II,



Dr. Indah Yuliana, SE.,MM
NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE.,M.Si
NIP. 19720212200312 1 003


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021”. telah diuji dalam sidang tesis tanggal 4 Januari 2023.

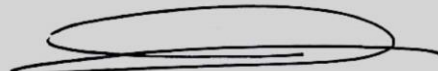
Dewan Penguji,


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag
NIP. 201910011579


Penguji Utama


Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si
NIP. 19670227 199803 2 001

Ketua Penguji


Dr. H. Misbahul Mupfr, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200301 1 005

Anggota/Pembimbing I


Dr. Indah Juliana, SE.,MM
NIP. 19740918 200312 2 004

Anggota/Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifaturrahmi

NIM : 18801019

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dari naskah ini disebutkan sumber kutipannya dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, serta menegakan integritas akademik di institusi ini.

Malang, 10 Desember 2022



MOTTO

“Kekhawatiran berlebihan seseorang terhadap apa yang akan terjadi di masa depannya, tak lain merupakan sikap buruk sangkanya terhadap Allah Ta’ala.”

Syaikh Abdul Qadir Jaelani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Saya haturkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kuat dan nikmat rezeki kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Persembahan tesis ini peneliti berikan kepada:

1. Untuk orang tua tercinta Bapak Alwi dan Ibu Siti Nurmi atas jerih payah, do'a dan motivasi kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.
2. Mutmainnah, Suci Mulyati dan Afrijal selaku adik peneliti, terima kasih selalu memberikan semangat dan motivasi, semoga sehat selalu.
3. Keluarga tercinta, terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
4. Sahabat peneliti, terima kasih banyak atas dukungan, bantuan, perhatian dan semangatnya. Sehat selalu orang-orang baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah, segala puji peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memebrikan rahmat dan hidayah yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dengan terselesaikannya tesis ini.

Pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini amatlah banyak, untuk itu penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas dengan palaha yang berlipat ganda, peulis sampaiakan dengan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Direktur program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. beserta segenap jajaran pimpinan pascasarjana.
3. Ketua dan sekertaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, bapak Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si. dan bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.
4. Pembimbing I, Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei. yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan sangat baik. Terima kasih atas bimbingan dan arahanNya, semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat oleh Allah SWT.
5. Dr. Indah Yuliana, SE.,MM selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan sangat baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta motivasi, nasehat dan kesabarannya selama membimbing tesis ini hingga selesai. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.
6. Seluruh dosen di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas

ilmu yang diberikan semoga ilmu yang peneliti peroleh selama studi bisa bermanfaat bagi umat dan barokah.

7. Kedua orang tua peneliti, bapak Alwi dan Ibu Siti Nurmi yang tiada henti mendoakan serta memberikan dukungan secara materi sehingga peneliti bisa berada di tahap ini
8. Kepada adik-adik tercinta Mutmainnah, Suci Mulyati dan Afrijal yang selalu memberikan peneliti semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Terimakasih tak terhingga juga peneliti ucapkan untuk keluarga besar penulis, atas motivasi, do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesisi ini.
10. Semua teman-teman Magister Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah medampingi hari-hari selama perkuliahan berlangsung walaupun kita dipisahkan jauh dengan keadaan.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta waktu yang dimiliki. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan penulisan ini selanjutnya. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti serta umumnya bagi pembaca. Aamiin

Batu, 10 Januari 2023

Hormat Saya

Ifaturrahmi
NIM. 18801019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian	15
G. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Landasan Teoritis	28
1. Pertumbuhan Ekonomi	28
1.1 Teori dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi	28
2. Indeks Pembangunan Manusia	32
2.1 Teori dan Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
3. Tingkat Kemiskinan	37
3.1 Ukuran Kemiskinan	38
3.2 Indikator Kemiskinan	39
3.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	39
3.4 Karakteristik Kemiskinan.....	43
4. Pengangguran	45
4.1 Teori dan Konsep Pengangguran	45
4.2 Jenis-Jenis Pengangguran.....	47
4.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran.....	48
B. Perspektif Islam Tentang Variabel Penelitian	49
1. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	49
2. Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	51

3. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam	53
4. Tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	54
4.1 Pengertian Kemiskinan	54
4.2 Bahaya Kemiskinan	56
4.3 Penyebab Kemiskinan	58
C. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Variabel Penelitian	65
C. Populasi dan Sampel	65
D. Data dan Sumber Data	65
E. Tehnik Pengumpulan Data	66
F. Definisi Operasional Variabel	66
G. Tehnik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN	75
A. Gambaran Umum Penelitian	75
B. Paparan Data Peneliiian	78
1. Deskripsi Variabel Penelitian	78
a. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB	78
b. Perkembangan IPM di Provinsi NTB	79
c. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB	80
d. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB	83
C. Analisis Data	84
1. Statistik Deskriptif	84
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel	86
3. Uji Asumsi Klasik	90
D. Pengujian Hipotesis	93
E. Pengujian Hipotesis MRA	95
BAB V PEMBAHASAN	97
A. Pembahasan Variabel Penelitian	97
1. Pengaruh Pertmbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	97
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan	
3. Pengaruh Pertmbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan	
Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi	101
4. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran	
Sebagai Variabel Modersi	102
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB	5
Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi NTB.....	11
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	66
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Tahun 2021	77
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Provinsi NTB Tahun 2017-2021	78
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB Periode 2017-2021.....	78
Tabel 4.4 Perkembangan IPM di Provinsi NTB Tahun 2017-2021.....	79
Tabel 4.5 Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB Tahun 2017-2021	83
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif.....	85
Tabel 4.7 Common Effect Model.....	86
Tabel 4.8 Fixed Effect Model	87
Tabel 4.9 Uji Chow	88
Tabel 4.10 Uji Hausman	88
Tabel 4.11 Uji LM Test.....	89
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas.....	91
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi	92
Tabel 4.14 Uji Heterokedasitas Metode Harvey	92
Tabel 4.15 Nilai Statistik dari Koefisien Determinasi Uji F dan Uji T.....	93
Tabel 4.16 Uji T	95
Tabel 4.17 Uji Moderasi (MRA).....	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2017-2021.....81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	63
Gambar 4.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	76
Gambar 4.2 Uji Normalitas Jarque-Bera.....	90

ABSTRAK

Ifaturrahmi, 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021). Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing (I) : Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei Pembimbing (II) : Dr. Indah Yuliana, SE.,MM

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi dan sosial yang sampai saat ini masih melanda seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi pada skala nasional tetapi juga terjadi di skala provinsi, salah satu yang cukup serius dialami oleh provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara nasional tercatat berada di urutan ke delapan paling miskin dari total 34 provinsi pada tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai variabel moderasi pada provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021) dengan menggunakan metode analisis data panel dengan analisis *Eviews 10*. Penelitian ini dibagi menjadi empat fokus penelitian yang meliputi: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan 2) pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan 3) pengangguran mampu memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan 4) pengangguran dapat memoderasi hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa setiap 1% peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Ketika indeks pembangunan manusia (IPM) naik maka tingkat kemiskinan akan menurun. Pengangguran mampu memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran mampu memperkuat hubungan antara indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran.*

مختصر البحث

إيفاط الرحمي، (٢٠٢٢). تأثير النمو الاقتصادي ومؤشر التنمية البشرية على مستويات الفقر مع البطالة كمتغير معتدل في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية (الفترة ٢٠١٧-٢٠٢١). برنامج الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور مصبح المنير، الماجستير (٢) الدكتور إنده يليان، الماجستير.

الفقر هو أحد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال تضرب جميع البلدان ، بما في ذلك إندونيسيا. مشكلة الفقر خطيرة للغاية بالنسبة لمقاطعة في إندونيسيا ، وهي مقاطعة نوسا تينجارا الغربية ، والتي تم تصنيفها على المستوى الوطني في المرتبة الثامنة من بين إجمالي ٣٤ مقاطعة في عام ٢٠٢١. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آثار النمو الاقتصادي والتنمية البشرية مؤشر (IPM) لمعدل الفقر مع البطالة كمتغير معتدل في مقاطعة غرب نوسا تينجارا (الفترة ٢٠١٧-٢٠٢١) باستخدام طريقة تحليل البيانات مع تحليل *Eviews 10*. هذا البحث مقسم إلى أربعة محاور بحثية تشمل: (١) تأثير النمو الاقتصادي على معدل الفقر (٢) تأثير مؤشر التنمية البشرية على معدل الفقر (٣) البطالة قادرة على تعديل العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدل الفقر (٤) يمكن للبطالة أن تعمل على تهدئة العلاقة بين مؤشر التنمية البشرية على مستوى الفقر. تظهر نتائج التحليل أن النمو الاقتصادي له تأثير إيجابي على مستويات الفقر. وهذا يعني أن كل زيادة بنسبة 1٪ في النمو الاقتصادي ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية. لمؤشر التنمية البشرية (IPM) تأثير سلبي كبير على معدل الفقر. عندما يرتفع مؤشر التنمية البشرية (IPM) ، سينخفض معدل الفقر. البطالة قادرة على تقوية العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات الفقر. البطالة قادرة على تقوية العلاقة بين مؤشر التنمية البشرية ومعدل الفقر. الكلمات الأساسية: النمو الاقتصادي، مؤشر التنمية البشرية، الفقر، البطالة.

ABSTRACT

Ifaturrahmi, 2022. The Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty Levels with Unemployment as a Moderating Variable in West Nusa Tenggara Province (2017-2021 Period). Postgraduate Islamic Economics Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor (I): Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei Advisor (II) : Dr. Indah Yuliana, SE., MM.

Poverty is one of the economic and social problems that still hit all countries, including Indonesia. The problem of poverty is quite serious for a province in Indonesia, namely West Nusa Tenggara Province, which nationally is listed as the eighth poorest out of a total of 34 provinces in 2021.

This study aims to analyze the Effects of Economic Growth, Human Development Index (IPM) on Poverty rate with unemployment as a moderating variable in the province of West Nusa Tenggara (2017-2021 period) using the panel data analysis method with Eviews 10 analysis. This research is divided into four research focuses which include: 1) the effect of economic growth on the poverty rate 2) the effect human development index on the poverty rate 3) the reaction is able to moderate the relationship between economic growth and the poverty rate 4) the reaction is able to moderate the relationship between the human development index and the poverty level

The results of the analysis show that economic growth has a positive effect on poverty levels. This means that every 1% increase in economic growth will increase the level of poverty in West Nusa Tenggara Province. The Human Development Index (HDI) has a significant negative effect on the poverty rate. When the human development index (IPM) rises, the poverty rate will decrease. Unemployment is able to strengthen the relationship between economic growth and poverty rates. Unemployment is able to strengthen the relationship between the human development index and the poverty rate.

Keyword: *Economic Growth, Human Development Index, Poverty, Unemployment.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan juga diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Menurut Khomsan (2015: 4-5) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Islam sendiri memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib di perhatikan, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, karena jika kemiskinan merajalela, akan banyak kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini. Dalam Al-Qur’an Allah SWT memberikan *warning* kepada siapa saja yang berani mengabaikan kepentingan orang miskin, dimana orang yang mengabaikan kepentingan orang miskin di *judgment* oleh Allah SWT, sebagai orang yang mengingkari hukum dan mengingkari siksa Allah SWT, hal ini disampaikan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Ma’un.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِآلِ دِينٍ ۚ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۚ ۳

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? orang itu adalah yang menghardik anak-anak yatim, dan yang tidak menghibau agar memberi makan kepada orang-orang miskin”. (Q.S. Al-Ma’un Ayat 1-3).¹

Allah SWT menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama yaitu, orang-orang yang menolak anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Menolaknya itu sebagai bentuk menghinaan dan takabur terhadap anak yatim itu. Sedangkan sifat pendusta agama berikutnya adalah tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan ayat diatas, bila tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu.²

Sebagai orang yang mengaku beriman, umat Islam secara personal maupun sebuah lembaga juga sebagai suatu negara haruslah memperhatikan dengan serius nasib-nasib orang miskin dan anak yatim yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menjalankan program pengentasan kemiskinan dalam bingkai agama maupun sosial. Program pengentasan kemiskinan dalam Islam begitu gencar digaungkan melalui khitob yang berarti *wajib*

¹ Q.S Al-Ma’un/107: 1-3.

²<https://www.republika.co.id/berita/q9q6uz430/tafsir-surat-ayat13#:~:text=Tahukah%20kamu%2C%20wahai%20Rasul%2C%20orang,zalim%20kepadanya%20dengan%20menahan%20haknya>

dan khitob anjuran yang berarti *sunnah* dengan sistem yang bervariasi, baik melalui individu seperti zakat, tolong menolong dalam kebaikan, bersedekah, larangan monopoli, maupun melalui lembaga kenegaraan seperti halnya mengelola *baitul mal* dan menata sistem distribusi yang adil dengan tujuan pemerataan supaya tidak terjadi disparitas ekonomi dan mengupayakan pendistribusian harta agar tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya saja. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian sangat serius terhadap rakyat miskin agar tercipta kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta atau sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 juta (17,47%) pada tahun 1996. Untuk mengurangi krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang berjumlah 47,97 juta atau sekitar 23,43% pada tahun 1999 menjadi 30,02 juta atau 12,49%. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi di lima tahun pertama pemerintahan angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, walaupun sempat mengalami kenaikan akibat dicabutnya subsidi BBM pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sempat naik menjadi 28,59 juta jiwa. Namun secara bertahap mengalami penurunan hingga 2019.³

³ [Infografik: Angka Kemiskinan Era Soeharto hingga Jokowi \(kompas.com\)](#)

Jika melihat lebih dalam lagi, pada daerah Provinsi sendiri persentase penduduk miskin terbesar pada maret 2021 berapa di Provinsi Papua sebesar 26,86%, kemiskinan terendah ada pada Provinsi Bali sebesar 4,53%. Provinsi NTB sendiri berada pada urutan ke delapan dari sepuluh Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pencapaian pembangunan di suatu wilayah dapat diketahui dari beberapa aspek sosial ekonomi, yaitu dengan melihat potret kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah menempatkan masalah kemiskinan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nusa Tenggara Barat. Jika dirata-ratakan setiap tahunnya Provinsi NTB menggelontarkan anggaran setiap sebesar 1,2-1,5 trilyun yang langsung mengarah kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan seperti program JKN, Rumah Layak Huni, Pembangunan Sarana Air Bersih, Bantuan Ekonomi produktif dan berbagai program lainnya. Besarnya alokasi anggaran dan banyaknya jenis program yang dilaksanakan tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat⁴. Hal ini terlihat dari persen angka kemiskinan yang mampu dicapai.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik NTB (BPS) jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 793,78 ribu jiwa dan 746,66 ribu jiwa pada tahun 2021.⁵ Pencapaian ini masih lebih rendah dari pada yang diharapkan.

⁴ Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016-2020”, <https://ntb.bps.go.id>

⁵ “Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat” di akses 10 Mei 2021, <https://ntb.bps.go.id/>

Sebagaimana ditetapkan, dalam (RPJMD 2018), angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 14,75% dan ditargetkan turun 1 persen setiap tahunnya sehingga di tahun 2021 seharusnya minimal sudah mencapai 11,75%. Sedangkan penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) (3,63%) lebih tajam dibandingkan pada Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 2,20%. Artinya, pengurangan orang miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan lebih lambat dibandingkan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2021 antar Provinsi sebagian besar masih berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1,14 juta jiwa.

Berikut ini disajikan tabel mengenai persentase tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lombok Barat	16,46	15,20	15,17	14,28	14,47
2	Lombok Tengah	15,31	13,87	13,63	13,44	13,44
3	Lombok Timur	18,28	15,55	16,15	15,24	15,38
4	Sumbawa	15,31	14,08	13,90	13,65	13,91
5	Dompu	13,43	12,40	12,25	12,16	12,16
6	Kota Mataram	9,55	8,96	8,92	8,47	8,68
7	Sumbawa Barat	15,96	14,17	13,85	13,34	13,54
8	Lombok Utara	32,06	28,83	29,03	26,99	27,04
9	Kota Mataram	9,55	8,96	8,92	8,47	8,68
10	Kota Bima	9,27	8,79	8,60	8,35	8,88

Sumber: (BPS NTB, 2021)

Dari tabel diatas tampak bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota cenderung mengalami penurunan, dimana tingkat kemiskinan

tertinggi pada tahun 2017 di angka 32,06% pada Kabupaten Lombok Utara dan 9,27% terendah pada Kota Bima. Kemudian tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2021 sebesar 27,04% pada Kabupaten Lombok Utara dan terendah pada Kota Mataram 8,65 persen. Meskipun mengalami penurunan akan tetapi persentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi 8 dari 10 besar Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Dengan tingginya angka kemiskinan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus melaksanakan peningkatan dan percepatan berbagai upaya serta strategi guna mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu penciptaan serta perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan kerja, penyediaan bantuan serta stimulasi modal usaha, memberikan kemudahan akses modal untuk UKM, pemenuhan kebutuhan dan hak dasar penduduk miskin dibidang kesehatan, pendidikan yang memadai secara gratis. Ningsih, (2019).

Awal mula penyebab kemiskinan tersebut bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori ini menjelaskan apa saja penyebab dari kemiskinan dinegara-negara yang sedang berkembang yang umumnya baru merdeka dari penjajah asing. Inti dari teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan akan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Akibat rendahnya produktivitas ini, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja, karena itulah tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Untuk bisa membangun kesejahteraan yang lebih baik, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada

titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah memberi modal kepada pelaku ekonomi.⁶

Pada tahun 1990, laporan Bank Dunia, *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan hal yang harus diperangi dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah kemiskinan menurun. Menurut Tambunan, (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari lingkaran kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan aktivitas pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran Yulianti, (2020).

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2017-2021 menunjukkan perlambatan, pada tahun 2018 pertumbuhan terkontraksi di angka -0,63 persen dan rata-rata pertumbuhan rendah dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019 ekonomi wilayah Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 4,51 meningkat cukup tajam dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi wilayah NTB, dengan pertumbuhan di tahun 2020 terkontraksi pada angka -1,64. Pertumbuhan antar provinsi rata-rata tumbuh

⁶ Arsyad, L, *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

kecuali pertumbuhan di Provinsi NTB tahun 2018, berkontraksi di angka -4,46 persen.⁷

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori *Trickle-Down Effect* oleh Lewis, W. Arthur (1954) menyatakan bahwa kesejahteraan yang didapatkan sekelompok masyarakat dalam hal ini masyarakat golongan kaya akan dengan sendirinya memberikan pengaruh kebawah yang akan membuka peluang kesempatan kerja dan berbagai peluang ekonomi lainnya sehingga akan mampu menciptakan kondisi persebaran hasil dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Hasil studi empiris oleh Primandari, (2018), Ruch, (2017), Irmanelly, (2021) dan Ardian (2021) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil sebaliknya ditemukan oleh Faisal (2020) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan timbal balik.

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan perekonomian menurut konsep pembangunan ekonomi Islam adalah bergantung pada keberhasilan pembangunan manusia. Manusia adalah mahluk pembangunan yang kualitasnya ditentukan oleh hasil pembangunannya.⁸ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indeks pembangunan

⁷ “Badan pusat statistik”. Di akses 10 mei 2021.
<https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/753/maret-2021---jumlah-penduduk-miskin-di-ntb-746-66-ribu-orang-.html>

⁸ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001).

manusia merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Indeks pembangunan manusia dibentuk dari 3 dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM. IPM sendiri diperkenalkan oleh UNDP pertama kali pada 1990. Menurut Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran.⁹ Begitu pentingnya pencapaian IPM, program pemerintah maupun pemerintah daerah dijalankan guna keberhasilan IPM tersebut.

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini misalnya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ardian (2021) bahwa IPM berpengaruh signifikan positif terhadap

⁹ Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan* (Jakarta: Erlangga, 2003).

tingkat kemiskinan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Sari, (2020), Mukhtar, (2019), Andhykha, (2018), Indrawati, (2020) dan Syata, (2021) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika terdapat kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka akan menurunkan persentase tingkat kemiskinan. Kontradiksi ini mengindikasikan bahwa pentingnya riset serupa dalam rangka mengetahui hubungan IPM dan kemiskinan dalam cakupan wilayah tertentu baik lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas sebagai arahan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Kinerja capaian Indeks pembangunan manusia provinsi NTB menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah IPM nasional (72,29). IPM provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 68,65 persen, kondisi ini masih menempatkan NTB di kategori “Sedang” (60-70), dan masih menduduki urutan ke-29 di tingkat nasional. Terdapat kesenjangan capaian IPM antar daerah di NTB, daerah perkotaan dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan memadai cenderung memiliki capaian yang tinggi, sementara daerah Kabupaten dengan jumlah penduduk besar atau angka kemiskinan tinggi capaiannya cenderung masih rendah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran saat ini bukan hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga menjadi masalah sosial yang terus berkepanjangan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran karena pendapatan akan mencapai maksimum dalam kondisi penggunaan tenaga kerja

penuh (*full employment*). Semakin rendah tingkat kemakmuran, semakin besar peluang timbulnya kemiskinan.

Akibat pandemi Covid-19 menyebabkan berhentinya kegiatan perekonomian yang berimbas pada PHK dan pengurangan jumlah pekerja. Begitu pula yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkurangnya jumlah pekerja ini terjadi hampir di semua sektor, utamanya sektor pariwisata, konstruksi dan industri pengolahan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 di Provinsi NTB tercatat sebesar 3,01 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2,74 juta orang, tercatat turun signifikan dibanding provinsi lainnya. Ada atau tidaknya pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diperkuat oleh penelitian Faisal (2020) dan Andhykha (2018) setiap kenaikan pengangguran diikuti dengan peningkatan kemiskinan.

Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan, pengangguran diharapkan dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel mengenai tingkat pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di
Provinsi NTB Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lombok Barat	3,32	3,22	4,52	4,58	3,32
2	Lombok Tengah	2,90	2,98	2,44	3,74	2,33
3	Lombok Timur	3,64	3,02	3,35	4,17	2,79
4	Sumbawa	3,98	3,29	2,99	4,01	3,39
5	Dompu	2,36	3,18	3,04	3,28	3,02

6	Bima	1,55	4,63	2,79	2,89	1,58
7	Sumbawa Barat	5,15	3,53	5,29	5,50	5,52
8	Lombok Utara	1,74	-	1,99	3,01	1,75
9	Kota Mataram	5,35	6,49	5,28	6,83	5,19
10	Kota Bima	3,51	2,27	4,06	4,42	3,56

Sumber: BPS NTB 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dari tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kota Mataram sebesar 5,35 persen, dan terendah sebesar 1,55 pada kota Bima. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021, dimana tingkat pengangguran tertinggi pada kota Mataram sebesar 5,19 persen dan 1,58 persen terendah pada Kabupaten Bima (BPS NTB, 2020). Penelitian Faisal, (2020), Prasetyoningrum, (2018), Nainggolan, (2020), Alvianto, (2017) dan Putra, (2016) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian hasil yang sebaliknya oleh Kolibu, (2019) menemukan bahwa secara parsial tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga dalam hal ini pengangguran tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori tersebut, indikator makro yang masih terdapat gap antara target dan realisasi adalah pertumbuhan ekonomi dan penurunan persentase penduduk miskin. Melihat kenyataan dalam penelitian sebelumnya penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan penelitian yang meyakinkan dan mampu memperoleh pemahaman akan kebenaran mengenai pengetahuan khususnya masalah kemiskinan dengan menjadikan pengangguran sebagai variabel moderasi yang nantinya diharapkan

dapat membuktikan apakah pengangguran dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.

Berangkat uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021?
3. Apakah pengangguran dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021?
4. Apakah pengangguran dapat memoderasi hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah pengangguran dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui apakah pengangguran dapat memoderasi hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi yang akan diterapkan dalam menanggulangi masalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran dan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021.

2. Bagi penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia,

pengangguran dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang serupa guna memperluas wawasan dan pengetahuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengacu pada keterbatasan ruang lingkup kajian, peneliti hanya membahas variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran dan tingkat kemiskinan sebagai variabel independen. Hal ini dikarenakan problem-problem yang peneliti temukan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peneliti ingin memaksimalkan variabel pengangguran sebagai variabel moderasi dalam hubungan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengacu pada keterbatasan aspek teknis penelitian, peneliti hanya memperoksikan variabel tingkat kemiskinan disamping banyaknya variabel lain. Hal ini berdasarkan data observasi yang peneliti temukan terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian atau studi yang membahas tentang tingkat kemiskinan telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan	Hasil
1	Novegya Ratih Primadari (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2017.	Secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi dari Sumatera Selatan.

2	Teguh Khalid Billady (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap kausalitas pembangunan sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan	Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kualitas pembangunan sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan, serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui kualitas pengembangan sumber daya manusia.	Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi dan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui kausalitas pengembangan sumber daya manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.
3	Meinny Kolibu dkk (2019). Pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.	Mengetahui pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.	Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah bersifat positif, yang berarti jika investasi meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.
4	Werner Ruch dkk (2017). Public capital investment, economic growth and poverty reduction in South African Municipalities.	Menguji hubungan antara investasi modal sektor publik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di tingkat kota di Afrika Selatan antara tahun 2001 dan 2011	Peningkatan investasi modal yang relatif besar hanya menghasilkan pengurangan kemiskinan yang kecil. Dengan demikian penelitian ini menimbulkan keraguan tentang investasi modal sebagai alat untuk mencapai target pengurangan kemiskinan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Afrika Selatan.
5	Jorge Garza Rodriguez (2018). Poverty and Economic Growth in Mexico	Menganalisis hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Mexico	Dalam jangka panjang, peningkatan 1% dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan

			2,4% dalam konsumsi per kapita (dan karenanya pengurangan kemiskinan). Dengan menggunakan uji kausalitas Granger ditemukan bahwa ada hubungan kausalitas dua arah antara pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Mexico.
6	Lora Ekana Nainggolan (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara	Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan dimediasi oleh indeks pembangunan manusia (HDI).	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan berdasarkan analisis Sobel diketahui bahwa indeks pembangunan manusia bukanlah variabel intervening, melainkan merupakan variabel yang berdiri sendiri sebagai variabel prediktor independen yang mempengaruhi kemiskinan
7	Stevani Adinda Nurul Huda dkk (2020). Analysis Of Trade, Unemployment, Government Contribution To Poverty In Three Poorest Countries In The World.	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di dunia seperti perdagangan, tingkat pengangguran, pemerintah di tiga negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia (Afrika Tengah, Kongo, dan Malawi)	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengangguran terhadap kemiskinan sebesar 0,000 di bawah 5% sedangkan hasil yang berbeda tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pemerintah dan perdagangan terhadap kemiskinan masing-masing 30% dan 6,6% jauh di atas profitabilitas.
8	Muhammad Faisal dkk (2020). The Analysis Of Economic Growth, Unemployment Rate And Inflation On Poverty Levels	Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran

	In Indonesia (Using The Vector Error Correction Model (VECM) Method).	inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
9	Sumargo B, Simajuntak N (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia	Sejauh ini kebijakan pengentasan kemiskinan masih berorientasi pada pendekatan moneter, sementara kemiskinan bersifat multidimensi, ini berarti bahwa kemiskinan multidimensi didefinisikan sebagai kondisi kurangnya semua indikator kemiskinan yang ada.	Studi ini menemukan deprivasi utama indikator kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat diarahkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan deprivasi utama kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 dan metode pengukuran kemiskinan multidimensi Alkire-Foster, serta 12 indikator dalam tiga dimensi (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup), maka ditemukan skala prioritas bantuan pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan deprivasi utamanya, yakni program bantuan untuk mengatasi permasalahan lama sekolah dan imunisasi, kecuali di Provinsi Maluku adalah persoalan penolong kelahiran dan di Papua adalah persoalan melek huruf.
10	Komang Wididarma (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	Menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.	Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh

		Menganalisis pengaruh langsung indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tidak langsung indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.	terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi antara indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
11	Yovita Sari dkk. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017.	Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Indeks pembangunan manusia dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2017.
12	Saparuddin Mukhtar dkk. (2019). The Analysis Of The Effects Of Human Development Index And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia.	Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia.	Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
13	Ridho Andykha dkk. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	Menganalisis Produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) yang mempengaruhi kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
14	Ikke Indrawati dkk, 2020. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua yang meliputi pertumbuhan ekonomi,	Ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh positif dan

	Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2014-2019.	ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen dalam kurun waktu 2014-2019.	tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, dan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2014 sampai 2019.
15	Putu Tedy Suepa, 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Serta Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Timur.	Menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di tiga kota di Kalimantan timur.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di tiga kota di Kalimantan timur, pengangguran dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
16	Elisabeth Nainggolan, 2020. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019).	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada periode 2010-2019.	Tidak terdapat hubungan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
17.	Reki Ardian dkk 2021. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi	Mengetahui perkembangan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di provinsi Jambi periode 2000-2017.	Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Sebaliknya pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

18.	Radiatul Fadila Dkk 2020. Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatera barat periode tahun 2013-2018.	Mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat,	Hasil penelitian menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
19	Siti Walida Mustamin (2017). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, inflasi, dan investasi terhadap kemiskinan (baik secara langsung maupun tidak langsung) melalui pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, (baik secara langsung maupun tidak langsung), melalui tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskina, sedangkan pengaruh inflasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, (3) investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan (4) pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran dan pengaruh

			pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah Penulis

G. Hipotesis Penelitian

Dari keempat rumusan tersebut disusunlah hipotesis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dengan pendekatan masing-masing sebagai berikut:

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan berdasar pada teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan

ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Mankiw, (2006) dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syaratnya bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).¹⁰

Hasil penelitian sebelumnya juga menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Kesimpulannya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan, kesimpulan ini didapatkan oleh Ardian (2021), Garza (2018), Fadila (2020), Primandari, (2018), dan Indrawati (2020) hasil. Berangkat dari teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

¹⁰ Sukirno Sadono, 2005, Pengantar Mikro Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan

Todaro, (1998) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan itu sendiri. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kenaikan kemiskinan. Semakin tinggi komposit dari indeks pembangunan manusia yang dilihat dari 3 komponen utama IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan, maka akan tercipta kesejahteraan dalam suatu negara dan perlahan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya ketika indeks pembangunan manusia suatu negara rendah, maka keterampilan pengetahuan dan produktivitas tenaga kerjanya juga rendah sehingga akan mendorong kenaikan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Mukhtar (2019) Andhykha (2018), Indrawati (2020) dan Fadila (2020) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

3. Pengangguran Memoderasi Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan satu kesimpulan, yaitu pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil kesimpulan ini didapatkan oleh (Primandari, 2018), Kolibu (2019) dan Stevani (2020).

H3 : Pengangguran dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

4. Pengangguran memoderasi hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja

sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

H4 : Pengangguran tidak dapat memoderasi hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

1.1 Teori dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standar of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat¹¹. Dengan kata lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan sebuah indikator yaitu, Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product (GDP)*)¹². *Gross Domestic Product (GDP)* merupakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto mencerminkan kinerja ekonomi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan total setiap orang dalam perekonomian. Sebuah negara yang memiliki *Gross Domestic Product* yang tinggi, menunjukkan negara tersebut memiliki kinerja perekonomian yang baik.

¹¹ Nanga, Muana, *Makroekonomi, Masalah dan Kebijakan Edisi Ke 1* (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2001).

¹² Mankiw. *Makroekonomi Edisi ke Enam*, (Erlangga. Jakarta, 2000).

Kemudian menurut (Todaro, 1978), ada beberapa faktor penting atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

a. Akumulasi modal

Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

b. Pertumbuhan penduduk

Beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi

Teknologi merupakan sarana dalam mencapai efisiensi dan efektivitas produksi.

Kemudian menurut Jhingan proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, akumulasi modal, usaha, teknologi dan lainnya.¹³ faktor non ekonomi dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan administratif. Dari pendapat ahli diatas mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga yaitu teknologi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka

¹³ Jhingan, M. L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Depok : PT Raja grafindo Persada. 2018).

panjang. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah regional tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:¹⁴

$$R_{(t-1)} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{(t-1)}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Ket:

$r_{t=1}$ = Tingkat pertumbuhan ekonomi

PDRB_t = Produk domestik regional bruto tahun yang dihitung

$\text{PDRB}_{(t-1)}$ = Produk domestik regional bruto tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan melalui redistribusi pendapatan. Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Develop Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga

¹⁴*Ibid*, hlm. 144.

menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bila mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat

kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1 Teori dan Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori ekonomi tentang teori modal (*human capital*) yang dipelopori oleh Becker (1964) menjelaskan bahwa manusia yang memiliki IPM tinggi dalam hal ini pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pekerjaan dan pendapatan yang besar dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila pendapatan mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitasnya dan hasil ekonominya sehingga pertumbuhan ekonomi akan bertambah lebih tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu proses pembangunan manusia yang mengutamakan penduduk secara komprehensif pada aspek ekonomi berupa kenaikan pendapatan perkapita dan non ekonomi berupa tingginya angka melek huruf dan harapan hidup, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya secara optimal. Pemerintah harus menggunakan kebijakan untuk mencapai pembangunan SDM yang kompeten melalui 4 pilar yaitu, pemerataan, produktifitas dan kesinambungan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah

sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka. Untuk mendorong agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan maksimal, maka diperlukan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara/wilayah yang bersangkutan.¹⁵Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan mendorong kemajuan ekonomi dan daya saing suatu bangsa.

Kemudian menurut Syafi'i dan Hidayati dalam (Mukhtar, 2019) bahwa tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu perekonomian bangsa, perekonomian yang berjangka panjang dan berkelanjutan.

UNDP mengelompokkan IPM menjadi 4 kategori yaitu: IPM dengan level sangat tinggi untuk nilai $IPM \geq 0.800$: IPM level tinggi untuk nilai IPM lebih dari 0.700 hingga 0.800, IPM level sedang untuk nilai IPM lebih besar dari 0.550 hingga 0.700 dan IPM level rendah untuk nilai IPM lebih dari 0.500 hingga 0.700 dan IPM level rendah untuk nilai IPM kurang dari 0.550. (Aprilianti & Harken, 2021).

Kemudian komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga diantaranya sebagai berikut:

2.1.1 Harapan Hidup

¹⁵ Patta Rapanna., *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: Cv Sah Media. 2017) 38.

Angka harapan hidup suatu perkiraan tingkat umur rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu.¹⁶ Menurut Bdan Pusat Statistik harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian angka harapan hidup dapat mengukur dari sejak lahir dalam rata-rata hidup di suatu penduduk. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari survei ekonomi nasional (SUSENAS) 2011-2013 antara lain:¹⁷ Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Rata-rata lama sakit, Angka kesakitan (%), Persentase pemberian ASI dan Rata-rata bayi disusui (Bulan).

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Dalam Islam pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia. Allah SWT mengistimewakan orang-orang yang berilmu sebagaimana yang tertulis pada Q.S. Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu), maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

¹⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

¹⁷ Christina Usmaliadanti: *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009, Disertasi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2011). 59.

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."¹⁸

Ayat diatas menegaskan sewajibnya untuk menimba ilmu dalam arti melakukan suatu proses pendidikan. Dalam hal ini sudah semestinya pemerintah memperhatikan selain kesehatan namun juga pendidikan agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari pendidikan. Perhitungan IPM terbagi menjadi dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian didefinisikan dalam tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas.¹⁹

2.1.3 Standar Hidup Layak

Dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diminati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.²⁰ Hal ini menunjukkan berapa seharusnya kebutuhan yang harus ditingkatkan seorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang secara layak.²¹ Standar hidup layak diukur dengan menggunakan GNP rill yang disesuaikan.²² Perhitungan paritas daya beli menggunakan metode baru yaitu 96 komoditas, dimana 66 merupakan makanan dan sisanya yaitu komoditas non makanan.²³ Dalam perhitungannya menggunakan batasan maksimum dan minimum.

¹⁸ Al-Qur'an, 58:11.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*.

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021.

²¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Op.Cit. Hlm. 31*.

²² Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Op.Cit.H. 32*.

²³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Op.Cit.h.5*.

Kemudian Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga indikator yang telah disepakati oleh UNDP, yaitu:²⁴

a. Dimensi Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Dimana:

I : Indeks

AHH : Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dimana:

²⁴ Metodologi Perhitungan Indeks Komponen BPS Indonesia.

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
I _{kesehatan}	: Indeks Kesehatan
I _{pendidikan}	: Indeks Pendidikan
I _{pengeluaran}	: Indeks Pengeluaran

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia memiliki tujuan penting, yaitu, membangun indikator yang dapat mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut tetap sederhana, membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar dan menciptakan suatu ukuran aspek sosial dan ekonomi.²⁵

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan sering dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, papan pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kesulitan dan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ditambah dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶ Orang dikatakan miskin jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain lebih rendah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat. Menurut Al-Ghazali kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Op. Cit.H.5.*

²⁶ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016) 61.

kebutuhan dasar bukan termasuk kemiskinan.²⁷ Kemiskinan merupakan yang lahir dari suatu proses panjang yang melibatkan tarik menarik serta reaksi berbagai faktor. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab, tetapi sebagai akibat adanya ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktur masyarakat.

3.1 Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu:²⁸

- a. Tingkat kemiskinan (P0), proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.
- b. Kedalaman kemiskinan (P1), rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jaunya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan.
- c. Keparahan kemiskinan (P2), rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi diterapkan oleh perkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2 itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) secara oprasional mendefinisikan, kemiskinan dipandang sebagai

²⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta ; Prenada Media Grup, 2015) 23.

²⁸ https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Ukuran_Kemiskinan

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

3.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- a. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap index*-P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity Index*-P2), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:²⁹

²⁹ Dadan Hidayana, 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. (Skripsi). Institut Pertanian, Bogor

a. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

b. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

c. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang akan menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

d. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat disetiap 10 tahun menurut hasil Sensus Penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bererja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

e. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Kurangnya perhatian dari Pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Selanjutnya dari berbagai teori yang ada, dapat disederhanakan setidaknya untuk penelitian ini, bahwa ada dua paradigma atau teori utama (*grand theory*) tentang kemiskinan yang menjadi acuan, yaitu paradigma neo-liberal dan paradigma sosial demokrasi.

1) Paradigma Neo-Liberal

Para pendukung paradigma neo-liberal berpendapat bahwa kemiskinan hanyalah masalah parsial atau individual, disebabkan oleh kelemahan individu dalam menentukan pilihan yang bersangkutan. Kemiskinan akan berkurang bahkan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi bisa dipacu setinggi mungkin dan kekuatan pasar dapat diperluas sebanyak mungkin.

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan. Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian.

Bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Akan tetapi memang pendekatan income povert ini lebih mudah dilihat serta dikaji dan dapat diukur langsung, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan masyarakat miskin.

2) Paradigma Sosial Demokrat

Para pendukung paradigma sosial demokrat mengatakan bahwa masalah kemiskinan bukan semata-mata masalah individu, melainkan masalah yang lebih bersifat struktural, yaitu dimana kemiskinan lebih disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat ke beberapa sumber yang tersedia. Pendekatan ini sangat mengkritik pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai persyaratan dalam memperoleh kemandirian serta kebebasan. Hal ini akan tercapai apabila setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar kebebasan dari pengaruh luar namun bebas untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan dan memenuhi kebutuhannya.

Kelemahan teori ini yaitu adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin, hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur institusi, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk dapat mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

3.4 Karakteristik Kemiskinan

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita, (1993) umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Berdasarkan kondisi kemiskinan, kemiskinan memiliki 5 bentuk. Adapun bentuk-bentuk kemiskinan tersebut adalah:³⁰

³⁰ Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMPYKPN: Yogyakarta.

a. Kemiskinan Absolut

Adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

b. Kemiskinan Relatif

Adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

c. Kemiskinan Struktural

Adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

d. Kemiskinan situasional

Adalah kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

e. Kemiskinan kultural

Adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

4. Pengangguran

4.1 Teori dan Konsep Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan keadaan yang dihadapi bukan saja oleh negara-negara berkembang, akan tetapi juga oleh negara-negara maju. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.

Menurut Sjafrizal (2012), pengangguran menjadi satu parameter penting yang digunakan dalam mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat daerah. Tingginya pengangguran membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin tinggi pengangguran membuat semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan, karena akan menurunkan tingkat gaji golongan tenaga kerja yang berpendapatan rendah, akibatnya ketimpangan pendapatan akan meningkat (Sukirno, 2016).

Sedangkan tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Sama halnya seperti kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Menurut Todaro dalam (Hauzan, 2021), efek buruk pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Oleh sebab itu oleh Sukirno Sadano, (20 00) pengangguran biasanya dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- a. Pengangguran *Friksional*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran *Struktural*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
- c. Pengangguran *Konjungtur*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$$

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan presentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah antara individu yang memiliki pekerjaan dengan pengangguran.

Menurut Tambunan, (2001) pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.

- 2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:³¹

- 1) Pengangguran tersembunyi (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu (sakit, hamil, invalid/difabel)
- 2) Setengah menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- 3) Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal

³¹ Mahdar, 2015. "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi." Jurnal Al-Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut.³²

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan Kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

³² *Ibid.*

B. Perspektif Islam Tentang Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik³³. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT, Surat Hud ayat 61:

❖ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

٦١

*“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”.*³⁴

Dalam surat Hud ayat 61 diatas dijelaskan bahwa manusia telah dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memakmurkannya, mengolahnya sehingga menjadi suatu tempat untuk dihuni, masjid untuk ibadah, tanah untuk pertanian, tanaman untuk dipetik buahnya dan tempat rekreasi.

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam adalah *“A sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare”* sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang

³³ Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers On Economics, Administration And Transactions* (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1991).

³⁴ Al-Qur'an 11: 61.

benar dan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Kemudian dalam pandangan ekonomi konvensional, perbedaan mendasar tersebut terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktivitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusianya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi dan kepuasan batin.³⁵

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai moral), agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja -melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik dari pada tingkat pertumbuhan yang tinggi namun

³⁵ Zainal Abidin, "Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional)" *Jurnal Ekonomi*, Vol. NO. 2 Desember 2012, H 361.

dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun demikian yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.³⁶

2. Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam memberikan sebuah konsep teori dalam ilmu pembangunan syariah. Konsep pendekatan ekonomi pembangunan syariah ini yaitu suatu pembangunan yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu bangsa. Karena manusia merupakan sebuah subjek sekaligus objek pembangunan.³⁷ Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan suatu negara. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua tugas atau peranan penting yaitu sebagai *Abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifatullah Ard*, wakil Allah SWT dimuka bumi ini yang memiliki tugas untuk memakmurkannya.³⁸ Pembangunan dalam Islam dilakukan guna untuk mensejahterakan umat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiyah ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya berdasarkan atas kehendak Allah SWT, manusia diciptakan untuk

³⁶ *Ibid*, h 362

³⁷ Irfan Syauqi dan Beik Laily Dwi Arsyianti, *Op.Cit.h.15*.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Al-Qur'an 21 :107.

menjalankan perintah yaitu tugas dunia dan membangun kesejahteraan umat, manusia sangatlah berperan penting dalam proses pembangunan. Karenanya manusia merupakan *khalifah* dimuka bumi ini. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

“Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Apakah mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴⁰

Pada ayat diatas malaikat-malaikat menentang bahwa Allah SWT akan menciptakan manusia karena manusia hanya akan menyebabkan kerusakan dimuka bumi, namun Allah SWT lebih mengetahui apa yang di kehendaknya. Pendidikan menjadi cara atau alternatif untuk proses pembentukan moral baik, dengan moral yang baik akan tercipta *falah* dalam kehidupan umat manusia dan menjadikan manusia memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing.

Ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan pembangunan manusia yaitu Produktivitas, Pemerataan, Kestinambungan dan Pemberdayaan.⁴¹ Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur dalam pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai dari IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah atau negara itu dapat meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan

⁴⁰ Al-Qur'an 2 :30.

⁴¹ Mohammed Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia”. Jurnal *Economia*, Vol. 9 No. 1. (2013), 19.

dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, tingkat pengeluaran dan konsumsi agar dapat memenuhi standar hidup layak.⁴²

3. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadits yang menyatakan “kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran”.

Dalam Islam kerja adalah suatu prinsip, bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja cenderung mengantungkan kehidupannya kepada orang lain. Dengan tidak bekerja dia juga telah menyia-nyaiakan tangannya yang merupakan dumber daya juga sekaligus harta yang harusnya dimanfaatkan dengan baik. Ini berarti dia telah melakukan pentafsiran atas sumber daya yang ada padanya dan dikecam oleh Allah SWT, sebagaimana diungkapkan dalam firman Al-quran yang mengatakan hal ini sebagai kawan setan.⁴³

Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menodai kehormatannya. Mengemisk sama halnya dengan ketidakpercayaan terhadap tuhan dan ketidakyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk mencari nafkah. Dalam Al-quran larangan tentang mengemis ini sangat jelas tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 273:

⁴² Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015) 220.

⁴³ *Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 422.

وَأَنْ تَطَّلِقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhleng (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta).”⁴⁴

Oleh karenanya semua potensi yang ada pada diri haruslah digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, menciptakan atau mencari pekerjaan untuk memnuhi kebutuhan hidup.

4. Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

4.1 Pengertian kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraanya). Oleh sebab itu, hendaklah merka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁴⁵

⁴⁴ Al-Qur’an, 2: 273.

⁴⁵ Al-Qur’an, 4: 9.

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu yang mendefinisikannya. Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu *fakir* dan *miskin*. Definisi *fakir* menurut madzhab *Syafi'i* dan *Hambali* yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus yang syar'i, seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.

Sedangkan pengertian orang miskin menurut *mazhab Syafi'i* dan *Hambali* adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan rohani. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan ahlak, keluarga dan juga masyarakat.⁴⁶ Oleh sebab itu kemiskinan memiliki dampak buruk bagi masyarakat yang mengalaminya. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7:

⁴⁶ Nurul Huda, dkk, Op.Cit.H.24.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
 ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan.”⁴⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang yang lupa terhadap agama serta lalai atas kewajibannya dan tidak tolong menolong niscaya Allah SWT akan mencelakakannya dan mereka lah orang-orang yang termaksud dalam golongan mendustakan agama.

4.2 Bahaya kemiskinan

Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep *macheisme* dari persia, India atau paham *Rahbaniyah* kaum Masehi karena tidak ada satupun ayat Al Quran dan Hadist yang memuja kemiskinan. Hadist-hadist yang memuji *zuhud* bukan berarti setuju terhadap kemiskinan. Menurut Islam kekayaan adalah suatu nikmat dan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri oleh umat manusia, sebaliknya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihilangkan.⁴⁸ Dalam Al-Quran Surat Ad-Dhuha dijelaskan bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi yang artinya: *Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan (Qs. Ad-Dhuha : 8)*. Kelompok masyarakat miskin yang berada pada tingkat paling rendah sering dianggap sebagai penyakit masyarakat yang paling buruk.

⁴⁷ Al-Qur'an 107: 1-7.

⁴⁸ Yusuf Qardawi. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. (Jakarta:Gema Insani Pers,1995) hlm

Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrem banyak diminati dan semua perbuatan yang keji sering dihalalkan demi memenuhi keinginannya. Hal ini pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagian pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang.⁴⁹ Kemiskinan dapat membahayakan hal-hal sebagai berikut:

1) Kemiskinan Membahayakan Akidah

Kemiskinan dapat membahayakan akidah terutama pada masyarakat miskin yang tinggal dilingkungan orang kaya yang aniaya. Dalam keadaan ini kemiskinan dapat menebarkan benih-benih keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pembagian rezeki. Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat menimbulkan penyimpangan akidah.

2) Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain membahayakan akidah, kemiskinan juga dapat membahayakan akhlak dan moral, apalagi bagi kaum duafa yang tinggal dilingkungan orang kaya yang tamak akan mendorong orang miskin untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum.

3) Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pikiran

Kemiskinan dapat mengancam keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan menjadi rintangan besar bagi seorang pemuda untuk

⁴⁹ 23 Bayu Tri Cahya, Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Alquran dan Hadist, (*Jurnal Penelitian.*, Vol 9, No. 1, Februari 2015) hlm 43

melangsungkan perkawinan, disamping dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kecukupan ekonomi. Karena faktor kemiskinan ekonomi juga sering menyebabkan timbulnya pertengkaran rumah tangga bahkan perceraian. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak pada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Jelaslah bahwa Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia.

4) Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilan

Selanjutnya, kemiskinan juga membahayakan keamanan dan kestabilan sosial. Seseorang masih bisa bertoleransi jika kemiskinan yang menimpanya disebabkan karena kurangnya penghasilan, akan tetapi lain halnya jika kemiskinan disebabkan karena adanya kesenjangan atau ketidak-merataan distribusi pendapatan, keserakahan golongan kaya, dan sikap berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat diatas penderitaanorang banyak. Kemiskinan semacam ini dapat memutuskan hubungan kasih sayang antar sesama masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

4.3 Pengentasan Kemiskinan

Kemudian sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat nilai instrumental dalam mengentaskan kemiskinan, seperti: bekerja, jaminan dari keluarga dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumbernya, hak-hak selain zakat dan derma sukarela/filantropi.⁵⁰ Kemudian Qardhawi juga memberikan gagasan mengenai solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang fakir miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja.

⁵⁰ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 1997

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu. Pihak yang mampu ini diharapkan mampu dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan sehingga tingkat kemiskinan dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan kaum miskin, maka mereka disebut sebagai pendusta agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maun : 1-3, *Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*

Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain Ilmu para ulama, pemerintah yang adil, kedermawanan kelompok orang-orang kaya, do'anya orang-orang fakir, dan kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat.⁵¹

Berikut adalah prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat menjadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan yaitu:⁵²

⁵¹Irfan Sauqy, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta:Rajawali,2016) hlm26

⁵² 28 Retno Wuri, Kemiskinan : Bagaimana Islam Memandangnya. Jurnal The Moslem Planner#1, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Study Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, April-Mei 2013. hlm 5

- 1) Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro poor growth). Islam mencapai pro poor growth melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.
- 2) Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (pro poor budgeting). Dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro poor budgeting, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.
- 3) Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro poor infrastructure) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian
- 4) Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro poor public service), terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu : birokrasi, pendidikan dan kesehatan.
- 5) Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (pro poor income distribution). Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar, sesuai dengan keadaannya. Dengan hidup tentram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, ia sanggup menghadapi tantangan hidup, dan mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya kekafiran, kekufuran, kristenisasi dan lainnya.

Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya dan kaum Muslimin untuk menolong saudaranya agar mencapai taraf hidup yang layak? Serta bagaimana peran Islam dalam meningkatkan taraf hidup mereka dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup terhormat. Islam menjelaskan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

a) Bekerja

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah. Mencari nafkah merupakan jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam kemakmuran dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk bepergian diatas permukaan bumi ini.

b) Mencukupi Keluarga yang lemah

Salah satu konsep syariat Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan berusaha. Namun di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja. Konsep yang dikemukakan untuk menanggulangi hal itu ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. Islam memerintahkan anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi, sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain. Islam mewajibkan orang-orang kaya

agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah SWT untuk dilaksanakan.

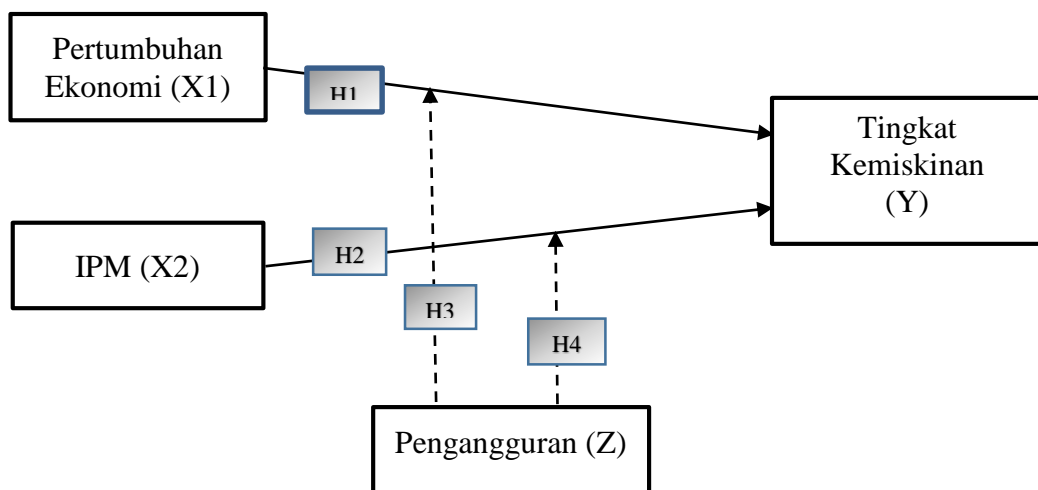
c) Zakat

Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pastinya yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Fakir miskin merupakan kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat. Karena itu, Nabi Shallallah*alaihi wa sallam tidak menyebutkan kelompok lain yang berhak atas zakat tersebut. Fakir miskinlah sasaran utamanya.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022

keterangan:

—————→ = Pengaruh Langsung

- - - - - → = Pengaruh Tidak Langsung (Moderasi)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *eksplanatory*. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan gabungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir serta meramalkan hasilnya. Penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021).

B. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen merupakan variabel yang akan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1) dan indeks pembangunan manusia (X2).
2. Variabel dependen merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y).
3. Variabel moderasi yaitu variabel yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen Sugiyono, (2017)'' Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah pengangguran.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021, dengan menggunakan data per tahun, sehingga menghasilkan populasi penelitian sebanyak 50 data. Adapun sampelnya adalah jumlah keseluruhan populasi pada penelitian ini.⁵³

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media seperti data yang tersedia pada laman resmi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan data pengangguran pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2021 yang diakses melalui laman resmi BPS Nusa Tenggara Barat..

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencatat dan menkopi data yang berasal dari website BPS Nusa Tenggara Barat. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data atau teori yang digunakan sebagai literatur penunjang dalam penelitian ini. Literatur penunjang diperoleh dari buku-buku erat hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dengan cara membuka website Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat dan men-download data yang berhubungan dengan pertumbuhan

⁵³ Purwanto, 2016. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ekonomi, IPM, pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021.

F. Definisi Operasional Variabel

Pemaparan variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel dan indikator-indikator variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Item	Indikator	Sumber
1.	Pertumbuhan ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun dari perbandingan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai rill.	Pertumbuhan ekonomi	Sukirno (2010)
2.	Indeks pembangunan manusia (X2)	IPM merupakan pengukuran yang menggambarkan dapatnya penduduk memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang baik.	-Kesehatan -Pendidikan -Standar hidup	Todaro (2012)
3.	Pengangguran (Z)	Pengangguran merupakan orang yang masuk kedalam angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan (yang tidak aktif mencari pekerjaan tidak termasuk pengangguran)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Todaro (2012)
4.	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan mengacu pada orang-orang di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dihitung sebagai variabel persentase	Persentase	Handbook on Poverty and Inequality (2009), (BPS, 2022)

Sumber: Data diolah penulis, 2022

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dan apakah variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis untuk pengujian data dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis yang didalamnya terdapat uji regresi moderasi. Analisis data penelitian ini menggunakan perhitungan statistik *Eviews 10*. *Eviews* digunakan sebagai alat bantu pengolahan data karena kemampuannya melakukan olah data panel, dimana *Eviews* dapat *generate* model *random effect* dan *fixed effect*. Selain itu *Eviews* dapat memilih model mana yang paling relevan atau cocok digunakan untuk menganalisis data panel pada penelitian yaitu melalui *uji chow*, *uji hausman* dan *uji LM*. Berikut penjelasannya:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan hasil olah data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data dalam macam-macam bentuk, yaitu tabel, diagram, lingkaran, grafik dan lainnya, yang didalamnya terdapat hasil data seperti nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis statistik deskriptif akan diperoleh karakteristik tingkat kewajaran data pada masing-masing variabel yang digunakan, dalam hal ini yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, IPM pengangguran dan tingkat kemiskinan.⁵⁴

⁵⁴ Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

2. Analisis Regresi Data Panel

2.1 Persamaan Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji hipotesis guna mengetahui hasil pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dengan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PE_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

α_0 = Konstanta

α_1 = Koefisien Regresi

Y = Tingkat Kemiskinan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

i = Entitas ke-1

t = Periode ke-t

ε = Error

2.2 Pemilihan Model Data Panel

Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel yaitu: pendekatan OLS biasa (*Pooled Least Square*), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*).

a. Model Kuadrat Terkecil (*Common Effect Model (CEM)*)

Model *common effect* yakni model yang simpel dalam olah data panel karena hanya dengan menggabungkan semua data *time series* dan data *cross section*.

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini juga memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variabel* (variabel yang hilang), yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*.

c. Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Model mana yang akan dipilih dari tiga pendekatan model yang ada maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu agar diperoleh pendekatan model yang paling sesuai dengan hasil penelitian ini.

2.3 Uji Statistik Data Panel

Pengujian statistik yang digunakan dalam data panel yaitu:

a. Uji Chow Test

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan. Model *common effect* dipilih jika nilai uji *p-*

$value > 0,05$. Namun jika nilai $p-value < 0,05$, model yang dipilih yaitu *fixed effect*. kemudian dilanjutkan uji hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang tepat digunakan antara model *random effect* dan model *fixed effect*. Model *random effect* dipilih jika nilai $p-value > 0,05$. Bila nilai $p-value < 0,05$, maka yang dipilih *fixed effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Model *random effect* dipilih jika nilai $p-value > 0,05$. Bila nilai $p-value < 0,05$, maka yang dipilih *fixed effect*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, karena untuk mengetahui dulu apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis dan tidak terjadi gangguan asumsi klasik (Situmorong & Lutfi, 2014). Berikut penjelasannya:

3.1 Uji Normalitas

Pada peneliti menggunakan uji normalitas *Jarque-Bera (J-B)*, dan menggunakan nilai signifikansi 0.05. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi normal dan memastikan bahwa data tersebut tidak ada yang *outlier*.⁵⁵

3.2 Uji Multikolinearitas

⁵⁵ Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Gejala multikolinearitas dapat dianalisis dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi menunjukkan jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi, yakni di atas 0,9, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

3.3 Uji Autokorelasi

Statistik *Durbin Watson (DW)* adalah pengujian autokorelasi pada residual dari model statistik atau analisis regresi. Statistik *Durbin-Watson* akan selalu memiliki nilai berkisar antara 0 dan 4. Nilai 2,0 menunjukkan tidak ada autokorelasi yang terdeteksi dalam sampel. Nilai dari 0 hingga kurang dari 2 menunjukkan autokorelasi positif dan nilai dari 2 hingga 4 berarti autokorelasi negatif.

3.4 Uji Heterokedastitas

Uji Heterokedastitas dalam penelitian bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain.⁵⁶ Dalam pengamatan ini untuk mendeteksi keberadaan heterokedastitas dapat dilakukan dengan uji *Harvey*. Uji *Harvey* adalah meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen.⁵⁷ Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

4. Uji Hipotesis

4.1 Uji t (Parsial)

⁵⁶ Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

⁵⁷ *Ibid*, hlm 120.

Uji t diperoleh pada bagian keluaran koefisien regresi yang berfungsi sebagai pengujian hipotesis secara individu Sugiyono, (2014) Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom *sig (significance)*. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05\%$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05\%$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing–masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.2 Uji F

Uji Simultan (Uji F) adalah setiap uji statistik di mana statistik uji memiliki distribusi-F di bawah hipotesis nol. bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat jika diuji secara bersamaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k), dimana n=jumlah pengamatan dan k=jumlah variabel. Maka apabila $a > 0,05$ maka model ditolak, dan apabila $a < 0,05$ maka model diterima.

4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui menilai seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghazali, (2016). Dari koefisien

determinasi dapat diketahui seberapa besar kontribusi variabel pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, apakah signifikan atau tidak.

4.4 Uji Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Variabel perkalian antara pertumbuhan ekonomi (X1), indeks pembangunan manusia (X2) dan pengangguran (Z) merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan pengaruh *moderating* variabel pengangguran (Z) terhadap pertumbuhan ekonomi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), dan pengangguran (Z) dan tingkat kemiskinan (Y).

Moderated Regression Analysis (MRA) berbeda dengan analisis sub integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Untuk menggunakan MRA maka harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator. Ketiga persamaan tersebut adalah (Ghozali, 2013: 219).

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + e \quad (1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + e \quad (2)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + e \quad (3)$$

Dari hasil regresi persamaan-persamaan diatas dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Jika variabel moderator (Z) tidak berinteraksi dengan variabel independen (X) namun berhubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel (Z) tersebut bukanlah variabel moderator melainkan merupakan variabel intervening atau variabel independen.
2. Jika nilai moderator (Z) tidak berinteraksi dengan variabel independen (X) dan juga tidak berhubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z merupakan variabel moderator homologizer.
3. Jika variabel moderator (Z) berinteraksi dengan variabel independen maka variabel Z tersebut merupakan *variabel quasi* moderator (moderator semu). Hal ini karena variabel Z tersebut dapat berlaku sebagai moderator juga sekaligus sebagai variabel independen.
4. Jika variabel Z berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z tersebut merupakan *variabel pure* moderator (moderator murni).

BAB IV

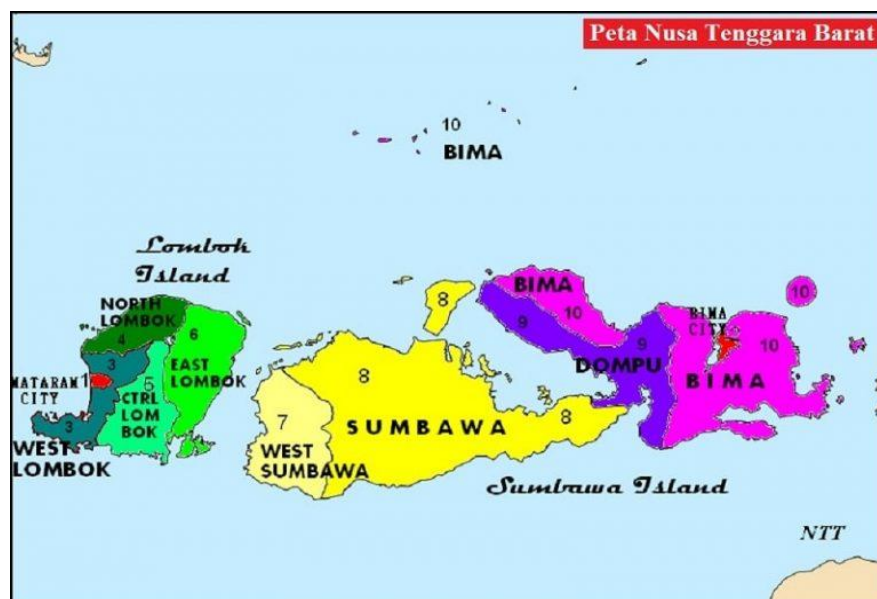
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Bab ini akan menjelaskan terkait hasil pengujian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel moderasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021, dengan menggunakan data panel yang terdiri dari *cross section* dan *time series*. *Cross section* dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, *time series* yang digunakan dengan jangka waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2017 hingga 2021, sehingga diperoleh sejumlah 50 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi BPS Nusa Tenggara Barat.

Mengenai gambaran objek penelitian. Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah Provinsi yang ada di Indonesia bagian barat kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi NTB sendiri beribukota di Mataram dan memiliki 10 Kabupaten dan Kota. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km². Terdapat dua pulau besar di Provinsi ini yaitu Lombok yang terletak di bagian barat dengan luas 4.738,70 km² (23,51%) dan Sumbawa yang terletak di timur dengan luas 15.414,5 km² (76,49%) selain itu terdapat pulau-pulau kecil sekitar 378 pulau

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46'-119°05' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudera Hindia, Sebelah Barat Selat Lombok dan Provinsi Bali dan Sebelah Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan temperatur udara menurut BMKG pada tahun 2017 di Provinsi NTB sekitar 33,2°C-33,6°C temperature udara minimum 17°C-21,4°C dan temperature rata-rata 26,9°C-27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57%-64% dan kelembaban udara maksimum 94%-96%. Berikut adalah gambar atau peta Provinsi NTB:



Gambar 4.1

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Secara administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan 116 Wilayah Kecamatan dan 1.146 Desa/Kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah Kecamatan terbanyak, yaitu 24

Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi Desa/Kelurahan terbanyak dengan 254 Desa/Kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Lombok Barat	10	122	896,56
2.	Lombok Utara	5	43	776,25
3	Lombok Tengah	12	139	1.095,03
4	Lombok Timur	21	254	1.230,76
5	Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Dompu	8	81	2.391,54
7	Bima	18	192	3.405,63
8	Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
	Kota Bima	5	41	222,25
Jumlah		117	1.152	18.572,32

Sumber : Provinsi NTB Dalam Angka 2022

Berdasarkan data di atas sangat terlihat bahwa Kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Sumbawa dengan jumlah 24 Kecamatan dengan 165 Desa/Kelurahan dan disusul dengan Kecamatan Kabupaten Lombok timur yang berjumlah 21 Kecamatan dengan 254 Desa/Kelurahan, untuk luas wilayah pun Kabupaten Sumbawa yang paling luas yaitu dengan luas 6.643,98 km.

1. Penduduk

Tabel 4.2

Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat 2017-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	2.405,080	2.550,498	4.955,578
2018	2.433,731	2.579,956	5.013,687

2019	2.461,652	2.608,733	5.070,385
2020	2.656,208	2.663,884	5.320,092

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat, 2020

Komposisi penduduk saat ini yang didominasi oleh penduduk usia muda, sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk NTB sebanyak 5,32 juta jiwa, dari jumlah tersebut didominasi oleh perempuan. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak jiwa yang mencakup mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak jiwa dan di daerah pedesaan sebanyak jiwa.

B. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB

Berikut deskripsi variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021:

Tabel 4.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Periode 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lombok Barat	4,94	-0,89	0,73	-8,70	1,62
2	Lombok Tengah	5,44	2,20	1,53	-12,91	2,24
3	Lombok Timur	5,40	2,63	2,30	-10,54	1,38
4	Sumbawa	5,86	3,21	2,30	-12,25	-0,07
5	Kab Dompu	5,23	2,91	1,34	4,97	0,98
6	Kab Bima	5,14	2,98	1,63	-6,63	0,31
7	Sumbawa Barat	-21,59	-36,3	-5,26	33,97	-2,55
8	Lombok Utara	5,10	-1,78	3,41	-16,00	-0,63
9	Kota Mataram	5,59	2,98	1,89	8,82	2,68
10	Kota Bima	4,53	2,66	1,47	7,83	1,31

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021, diolah oleh penulis

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021. Selama periode 2017-2021

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota pada Provinsi NTB cenderung mengalami fluktuasi.

2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB

Kualitas manusia di Provinsi NTB semakin membaik secara bertahap dengan giatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Selama periode 2017-2021, capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini didasari pada peningkatan masing-masing dimensi dari IPM itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan perbaikan program yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah pada setiap dimensi didalamnya, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Berikut tabel perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021:

Tabel 4.4

**Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota pada Provinsi NTB tahun
2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	66,37	67,18	68,03	68,2	68,61
2	Lombok Tengah	64,36	65,36	66,36	66,43	66,72
3	Lombok Timur	64,37	65,35	66,23	66,3	66,66
4	Sumbawa	65,84	66,77	67,6	67,61	68,01
5	Dompu	66,33	66,97	67,83	67,84	68,45
6	Kab Bima	65,01	65,62	66,37	66,3	66,66
7	Sumbawa Barat	70,08	70,71	71,52	71,63	71,85
8	Lombok Utara	63,04	63,83	64,49	64,42	64,77
9	Kota Mataram	77,84	78,43	79,1	78,91	79,14
10	Kota Bima	74,36	75,04	75,8	75,81	76,11

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat 2021, data diolah peneliti

Dari tabel 4.4 diatas terlihat capaian IPM di tiap-tiap wilayah cukup bervariasi. Capaian IPM di level Kabupaten/kota di NTB ada yang masuk kategori sedang dan tinggi. Terlihat sejak tahun 2017, ada 3 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori tinggi (70-80) yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kabupaten dengan capaian IPM rendah (60- < 70) yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.

Secara umum, pada tahun 2021 dimensi pendidikan menjadi dimensi dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dimensi lainnya di seluruh wilayah Provinsi NTB, baik itu pada indikator HLS maupun RLS. Capaian IPM NTB sendiri pada tahun 2021 ini, seluruh Kabupaten/Kota sempat mengalami penurunan. Dari sepuluh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM setelah sebelumnya beberapa Kabupaten/Kota sempat mengalami penurunan.

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB

Problematika kemiskinan selalu menjadi topik yang selalu dibicarakan, hal ini karena masalah kemiskinan hampir menjadi masalah di setiap negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya terjadi dalam skala nasional tetapi juga terjadi pada skala daerah Provinsi. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemiskinan merupakan masalah krusial yang harus diatasi.

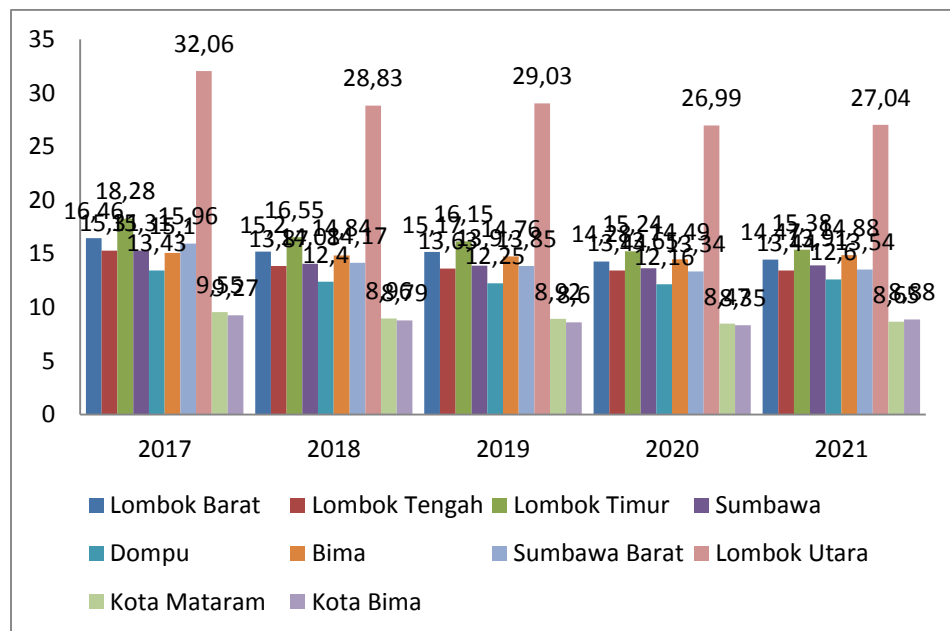
Pencapaian pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek sosial ekonomi, salah satunya yaitu potret kemiskinan di wilayah tersebut. Selama 5 tahun terakhir pembangunan ekonomi terus dipacu di Provinsi NTB

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk. Meningkatnya perekonomian ini sejalan dengan semakin berkurangnya persentase penduduk miskin di NTB setiap tahunnya. Berikut di bawah ini grafik persentase tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021:

Grafik 4.1

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Tahun 2017-2021



Sumber : BPS (Data di olah)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB sendiri sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 746,66 ribu orang atau 14,14 persen. Persentase penduduk miskin 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada setiap Kabupaten/Kota. Persentase penduduk miskin di Lombok Barat mengalami penurunan selama Periode 2017-2021, dari angka 16,47 persen (2017) ke angka 14,28 persen (2021), tetapi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya persentase tingkat kemiskinan di Lombok Tengah juga

konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai 2021, persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 15,31 persen kemudian turun sebesar 13,44 persen pada tahun 2021. Angka ini tidak berubah sejak tahun 2020. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin di wilayah Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari garis kemiskinan Kabupaten/Kota pada tahun 2021, Kota Mataram mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 499.013 rupiah per kapita per bulan. Tingginya garis kemiskinan di Kota Mataram secara umum menggambarkan mahalnya harga kebutuhan barang makanan maupun non-makanan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTB, hal ini terkait dengan posisi Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara itu garis kemiskinan terendah ada di Kabupaten Bima dengan nilai garis kemiskinan mencapai 363.228 rupiah per kapita per bulan.

Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Lombok Timur sebanyak 190,84 ribu jiwa atau 15,38 persen. Sedangkan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak yaitu Lombok Utara sebesar 27,04 persen.

4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Pengangguran yaitu istilah bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja atau memang sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang cukup layak. Pengangguran sering menjadi masalah ekonomi karena dengan

adanya pengangguran akan mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat. Apabila pengangguran disuatu daerah cukup tinggi maka akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.

Berikut penulis sajikan kondisi tingkat pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021.

Tabel 4.5

Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	3,28	3,22	3,52	4,58	3,32
2	Lombok Tengah	2,9	2,98	2,35	3,74	2,33
3	Lombok Timur	3,64	3,02	3,35	4,17	2,79
4	Sumbawa	3,98	3,29	2,99	4,01	3,39
5	Kab Dompu	2,36	3,18	3,04	3,28	3,02
6	Kab Bima	1,55	4,63	2,79	2,89	1,58
7	Sumbawa Barat	5,15	3,53	5,29	5,5	5,52
8	Lombok Utara	1,74	1,74	1,99	3,01	1,75
9	Kota Mataram	5,35	6,49	5,28	6,83	5,19
10	Kota Bima	3,51	2,27	4,06	4,42	3,56

Sumber: Data diolah Penulis

Tabel diatas menunjukkan persentase tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota pada Provinsi NTB selama periode 2017-2021, tingkat pengangguran di antar wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Dari tahun 2017-2021, Kota Mataram yaitu wilayah dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi, kemudian disusul oleh Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan wilayah dengan persentase tingkat pengangguran terendah yaitu Kota Bima, Lombok utara dan Lombok Tengah.

Penganggurn terjadi akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah tenaga kerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Adanya pengangguran mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum optimal memanfaatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup diri juga keluarganya.

C. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif berikut akan dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.275400	68.71240	3.555400	14.77760
Median	2.045000	67.07500	3.320000	13.99500
Maximum	33.97000	79.14000	6.830000	32.06000
Minimum	-36.30000	55.37000	1.550000	8.350000
Std. Dev.	9.371175	4.952816	1.242534	5.377193
Skewness	-0.743981	0.552953	0.605747	1.640469
Kurtosis	9.372819	3.352979	3.000223	5.661930
Jarque-Bera	89.22263	2.807545	3.057750	37.18839
Probability	0.000000	0.245668	0.216779	0.000000
Sum	13.77000	3435.620	177.7700	738.8800
Sum Sq. Dev.	4303.127	1201.989	75.65064	1416.796
Observations	50	50	50	50

Sumber: Olahan Eviews 10 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 pada variabel Tingkat Kemiskinan (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14.77760, yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, nilai tetingginya sebesar 13.99500, lalu nilai terendahnya sebesar 8.350000 yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, dengan nilai standar deviasi sebesar 5.377193.

Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) nilai rata-rata sebesar 0.275400, nilai tertinggi sebesar 33.97000, yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, lalu nilai terendahnya sebesar -36.30000 yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, dengan nilai standar deviasi 9,371175.

Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2), menunjukkan nilai rata-rata sebesar 68.71240 nilai tertinggi sebesar 79,14000, yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, lalu nilai terendahnya sebesar 55,37000, lalu nilai standar deviasinya sebesar 4.952816.

Pada variabel Pengangguran (X3), menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.555400, nilai tertinggi sebesar 6.830000 yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2017-2021, lalu nilai terendahnya sebesar 1.550000 lalu nilai standar deviasinya sebesar 1.242534.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan pengolahan data, penentuan model terbaik pada estimasi data panel harus dilakukan terlebih dahulu yaitu di antaranya, *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Tehnik yang digunakan yaitu *Uji Chow Test* untuk memilih antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Sedangkan

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Selanjutnya kita pilih persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Log PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogX1} + \beta_2 \text{LogX2} + \beta_3 \text{LogZ} + \beta_4 Y + \varepsilon_1$$

Tabel 4.7 Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.03127	9.843185	5.692393	0.0000
X1	-0.045024	0.063689	-0.706937	0.4832
X2	-0.559787	0.163603	-3.421616	0.0013
Z	-0.781065	0.648952	-1.203580	0.2349
R-squared	0.440792	Mean dependent var		14.77760
Adjusted R-squared	0.404321	S.D. dependent var		5.3 77193
S.E. of regression	4.150129	Akaike info criterion		5.760774
Sum squared resid	792.2844	Schwarz criterion		5.913736
Log likelihood	-140.0194	Hannan-Quinn criter.		5.819023
F-statistic	12.08638	Durbin-Watson stat		0.225473
Prob(F-statistic)	0.000006			

Sumber : Output Eviews 10 (data diolah)

Tabel 4.8 Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.42655	5.838182	4.869076	0.0000
X1	0.008412	0.014543	0.578392	0.5665
X2	-0.187118	0.084694	-2.209349	0.0334
Z	-0.223314	0.199876	-1.117259	0.2711
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.978745	Mean dependent var		14.77760
Adjusted R-squared	0.971852	S.D. dependent var		5.377193
S.E. of regression	0.902149	Akaike info criterion		2.850821
Sum squared resid	30.11331	Schwarz criterion		3.347947
Log likelihood	-58.27054	Hannan-Quinn criter.		3.040130
F-statistic	141.9839	Durbin-Watson stat		1.493419
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 10 (data diolah)

a. Uji Chow

Chow Test adalah alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien dan test ini ditemukan oleh *Gregory Chow*.⁵⁸ Chow Test merupakan uji dalam membandingkan model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect*. Dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 10*. Dalam penentuan model didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Model Common Effect*

H_a : *Model Fixed Effect*

Jika nilai probability $< 0,05$, maka akan menolahkan H_0 . Begitu juga sebaliknya jika nilai probability $> 0,05$ maka akan menerima H_0 . Hasil uji *Chow Test* dapat dilihat dalam tabel 4.6

Tabel 4.9 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	104.052642	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	163.497649	9	0.0000

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah)*

Berdasarkan hasil uji chow pada Tabel 4.9, diketahui nilai probabilitas adalah 0,0000. Karena nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *fixed effect* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di dalam panel data. Dalam pengujian ini membandingkan antara model *Fixed Effect* dengan

⁵⁸ Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

model *Random Effect* dimana dalam menentukan model yang mana yang terbaik untuk digunakan dalam regresi data panel. Dalam penentuan model ini didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Model Random Effect*

H_a : *Model Fixed Effect*

Jika nilai probability < 0.05 , maka akan menolak H_0 . Begitu juga sebaliknya jika nilai probability > 0.05 , maka akan menerima H_0 . Hasil uji *Hausman Test* dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.062370	3	0.1673

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah)*

Dari tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa, perolehan nilai *p value* sebesar $0.1673 > 0.05$ sehingga H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *Random Effect Model*, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

c. Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan common effect atau random effect. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Model common effect*

H_1 : *Model random effect*

Uji LM di dasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari nilai *alpha* maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya. Hasil uji LM test sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji LM Test

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Honda	8.993015 (0.0000)	-1.490411 (0.9319)	5.305142 (0.0000)
King-Wu	8.993015 (0.0000)	-1.490411 (0.9319)	3.748330 (0.0001)
SLM	10.27323 (0.0000)	-1.316100 (0.9059)	-- --
GHM	-- --	-- --	80.87432 (0.0000)

Sumber: *Olahan Eviews 10 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai p value lebih kecil dari pada 0,05, maka menerima H_a yang berarti estimasi yang terbaik adalah *Random Effect Model*.

3. Uji Asumsi Klasik

Regresi linier data panel didasari oleh *General Least Square* (GLS), maka uji asumsi klasik boleh tidak dilakukan jika hasil pengujian model data panel menunjukkan hasil *fixed effect model* (FEM) atau *Random effect model* (REM). Namun apabila hasil pengujian data panel menunjukkan hasil *Common effect model* (CEM), maka harus melakukan uji asumsi klasik karena regresi linier didasari oleh *Ordinary Least Square* (OLS). Gujarati, (2015).

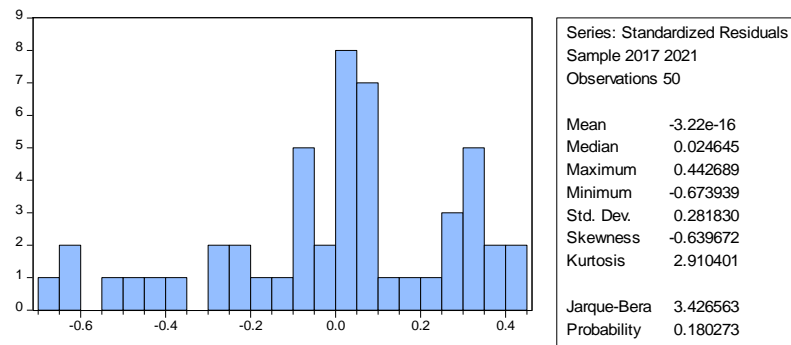
a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B) dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi

Jika nilai probabilitas $p \leq 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Gambar 4.4 Uji Normalitas *Jarque-Bera*



Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah)*

Gambar 4.4 diatas, diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 3,426663 dan juga nilai probabilitasnya sebesar 0,180273. Karena nilai probabilitas yakni 0,180273 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Apabila koefisien korelasi antar variabel bebas $> 0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami

masalah multikolinieritas. Sebaliknya, koefisien korelasi $<0,8$ maka model bebas dari multikolinieritas.⁵⁹

Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	97.81795	280.5705	NA
X1	0.004181	1.010796	1.009380
X2	0.027019	367.7689	1.863071
Z	0.425117	17.21384	1.850320

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 dapat dilihat nilai *Centered* VIF dari variabel bebasnya bervariasi. Semua variabel bebas memiliki nilai *Centered* kurang dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas. Sehingga model regresi data panel (REM) pada penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat diuji dengan menggunakan uji *Durbin Watson* yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi korelasi.

Tabel 4.13 Uji Autokorelasi

R-squared	0.178255	Mean dependent var	1.379538
Adjusted R-squared	0.124663	S.D. dependent var	0.985631
S.E. of regression	0.922151	Sum squared resid	39.11668
F-statistic	3.326145	Durbin-Watson stat	1.287760
Prob(F-statistic)	0.027654		

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah)

⁵⁹ Gujarati, D. N. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, nilai statistik *Durbin-Watson* 1,287760. Perhatikan bahwa karna nilai statistik *Durbin-Watson* terletak di antara 1 dan 3, yakni $1 < 1.287760 > 3$, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

d. Uji Heterokedasitas

Untuk menguji apakah terjadi heterokedasitas atau tidak digunakan uji *Harvey*. Tabel 4.14 disajikan hasil pengujian heterokedasitas dengan menggunakan uji *Harvey*.

Tabel 4.14 Uji Heterokedasitas Metode Harvey

Heteroskedasticity Test: Harvey			
F-statistic	1.264885	Prob. F(3,46)	0.2975
Obs*R-squared	3.810304	Prob. Chi-Square(3)	0.2827
Scaled explained SS	5.626676	Prob. Chi-Square(3)	0.1313

Sumber: *Olahan Eviews 10 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *chi square* (*Obs*R-squared*) sebesar 0,2872 sedangkan nilai kritis *chi square* sebesar 3,810304 dapat dilihat bahwa nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi masalah heterokedasitas.

4. Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji T). Nilai-nilai statistik dari koefisien determinasi, uji F dan uji T tersaji pada tabel 4.13.

Tabel 4.15

Nilai Statistik dari Koefisien Determinasi Uji F dan Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	31.30304	5.759638	5.434898	0.0000
X1	0.007552	0.014534	0.519639	0.6058
X2	-0.226770	0.081496	-2.782583	0.0078
Z	-0.265957	0.197911	-1.343823	0.1856
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.302917	0.9579
Idiosyncratic random			0.902149	0.0421
Weighted Statistics				
R-squared	0.178255	Mean dependent var		1.379538
Adjusted R-squared	0.124663	S.D. dependent var		0.985631
S.E. of regression	0.922151	Sum squared resid		39.11668
F-statistic	3.326145	Durbin-Watson stat		1.287760
Prob(F-statistic)	0.027654			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.267530	Mean dependent var		14.77760
Sum squared resid	1037.761	Durbin-Watson stat		0.048540

Sumber: Olahan Eviews 10 (data diolah)

a. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar ($R^2 = 0,178255$). Nilai tersebut dapat diartikan pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan sebesar 17% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai *prob* (*F-statistic*), yakni $0,027654 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, yakni pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

c. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis pada pengujian parsial ini sebagai berikut:

H₀ = Pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H_a = pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengambilan keputusan pada pengujian parsial ini yaitu : H₀ diterima dan H_a ditolak, apabila nilai *Sig* lebih besar dari taraf nyata (5% atau 0,05) atau variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 31.30304 + 0.007552X_1 - 0.226770X_2 - 0.265957X_3 + e$

Tabel 4.16 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.30304	5.759638	5.434898	0.0000
X1	0.007552	0.014534	0.519639	0.6058
X2	-0.226770	0.081496	-2.782583	0.0078
Z	-0.265957	0.197911	-1.343823	0.1856

Sumber: Olahan Eviews 10 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui:

⇒ Diketahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien 0,0075 namun tidak signifikan, dengan nilai Prob. 0,6058 > 0,05.

⇒ Diketahui IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien -0,2267, namun signifikan dengan nilai Prob. 0,0078 < 0,05.

⇒ Diketahui pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien -0,2659, namun tidak signifikan dengan nilai Prob. 0,1856 > 0,05.

d. Pengujian Hipotesis MRA

Pengujian menggunakan metode MRA atau Moderated Regression Analysis adalah analisis regresi yang menggunakan variabel moderating, yaitu variabel Pengangguran. Uji Moderated Regression Analysis ini dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Yaitu apabila hasil uji ini beta yang dihasilkan dari interaksi Z X terhadap Y, menghasilkan nilai negatif, maka variabel moderasi Z memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y, meskipun memperlemah tetapi pengaruhnya tidak signifikan, begitu juga sebaliknya. Jika beta menghasilkan positif, maka variabel moderasi Z memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut hasil uji variabel moderasi, yaitu:

Tabel 4.17 Uji Moderasi (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.64245	0.480284	26.32286	0.0000
X1	-0.010714	0.005884	-1.821044	0.0754
X2	-0.191841	0.006289	-30.50555	0.0000
Z	0.031250	0.018278	1.709696	0.0944
X1Z	0.000907	0.000381	2.383908	0.0215
X2Z	0.015234	0.000126	120.6357	0.0000

Sumber: Olahan Eviews 10 (data diolah)

$$Y = 12.64245 - 0.010714X_1 - 0.191841X_2 + 0.031250Z + 0.000907X_1Z + 0.015234X_2Z + e$$

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diperoleh persamaan moderasi sebagai berikut:

⇒ Pengangguran signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai Prob = 0,0215 < 0,05.

⇒ Pengangguran signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara IPM terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai Prob = 0,0000 < 0,05.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Variabel Penelitian

Dalam pembahasan ini kajian *pertama* adalah pembahasan uji analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, *kedua* analisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, *ketiga* analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel moderasi, *keempat* analisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel moderasi. Supaya pembahasan lebih mudah dipahami, peneliti akan menyajikan pembahasan dengan prosedur terbalik dari susunan bab, yakni pertama menyampaikan hasil penelitian terlebih dahulu, selanjutnya mengkritisi teori dasar yang digunakan apakah sesuai dengan hasil penelitian atau tidak, terakhir justifikasi dari hasil penelitian dan teori, dengan pendekatan nilai keislaman.

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa setiap 1% peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *trickle down effect* dimana pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah dari penduduk miskin pada suatu wilayah, dimana akan ada bagian dari

pertumbuhan ekonomi yang menetes kebawah dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan semakin memperkecil kesenjangan diantara kelompok kaya dan kelompok miskin. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat akan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin.

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Novergya (2018), Jorge (2018), Andykha (2018), Indrawati (2020) dan Mustamin (2017) yang menyimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya hasil penelitian ini membantah hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan timbal balik, diantaranya Muhammad Faisal, Ichsan (2020), yang juga meneliti *Analysis Of Economic Growth, Unemployment Rate And Inflation On Poverty Levels In Indonesia (Using The Vector Error Correction Model (VECM) Method)*, dengan kesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan timbal balik, kemudian Nainggolan (2021), Faisal (2020), Wididarma (2021), Suepa (2018), Elisabeth (2020), dan Fadila (2020).

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap tingkat

Kemiskinan

Berdasarkan perhitungan analisis regresi yang telah dijalankan menghasilkan nilai probabilitas senilai $-0,2267$ artinya menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota pada Provinsi NTB periode 2017-2021. Dengan setiap ada kenaikan 1% IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $-0,2267$. Hal ini dikarenakan IPM di provinsi kabupaten/kota pada provinsi NTB tahun 2017-2021 cenderung meningkat, meskipun tidak merata di setiap kabupaten/kota. Peningkatan IPM tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada provinsi NTB mampu mengindikasikan apabila ternyata IPM mampu meningkatkan pendapatan penduduk melalui peningkatan produktivitas, dengan demikian tingkat kemiskinan juga ikut menurun.

Sejalan dengan pernyataan Arsyad (2010), bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun. Aset utama penduduk miskin adalah tenaga

kerja kasar, maka dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas serta terjangkau, sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian, penelitian pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sesuai dengan teori sekaligus hipotesis penelitian. Seperti yang dinyatakan sebelumnya tingkat kemiskinan akan bergerak dengan pola yang negatif dengan IPM. Dalam hal ini terjadi peningkatan pada IPM maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun. Hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dengan IPM tersebut ditemukan di beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang mendukung teori dan yang sejalan dengan penemuan dalam penelitian ini diantaranya, Teguh Khalid (2019), Lora Ekana (2021), Yovita Sari (2020), Saparuddin (2019), Ridho Andhykha (2018), Ikke Iindrawati (2020) dan Radiatul Fadila (2020) bahwa ada suatu korelasi negatif antara IPM dengan tingkat kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi sumber daya manusia karena masyarakat yang miskin tidak akan memikirkan pendidikan dan kesehatan karena yang mereka pikirkan hanya bagaimana agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika manusia tidak memikirkan pendidikan maka dimasa depan taraf hidupnya akan sama seperti sekarang yang nantinya akan menyebabkan pengangguran meningkat.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, karena Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal maupun usaha yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:⁶⁰

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Ayat ini menjelaskan jika kita ingin memenuhi kecukupan dalam hidup maka kita harus berusaha dan bekerja keras. Allah SWT akan memberikan amalan yang baik jika umatnya mau berusaha dan bekerja keras dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan syariatnya. Dengan demikian kerja keras merupakan hal utama dalam mencapai suatu kesejahteraan, yang dalam penelitian ini kesejahteraan diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi

Dari hasil pengujian MRA diatas didapatkan nilai koefisien positif dan signifikan. Artinya pengangguran mampu memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata

⁶⁰ Al-Qur'an, 17:97.

lain hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak pengangguran di Kabupaten/kota pada provinsi NTB, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan teori menurut Sadano Sukirno (2004), menurutnya efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Seran, (2017) dengan judul “Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan” dimana apabila jumlah pengangguran meningkat akan mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya akan menjerumuskan masyarakat terhadap taraf hidup yang rendah dan berpotensi menjerumuskan mereka kedalam lingkaran kemiskinan.

4. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi

Pengujian pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel moderasi ditunjukkan oleh hasil olah data dengan *Eviews 10*, didapatkan nilai koefisien positif dan signifikan. Dengan demikian maka membuktikan bahwa pengangguran mampu memperkuat hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Indeks

pembangunan manusia secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran. Tingginya pembangunan manusia baik dari segi agama, jiwa, akan keturunan serta harta akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena apabila pembangunan manusia tinggi maka manusia semakin produktif dimana Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan yang mencukupi, akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menyerap tenaga kerja yang nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan akibat dari pengangguran.

IPM sendiri memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya tiga dimensi penting dalam pembangunan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Prasetyoningrum, 2018), bahwa *Islamic Human Development Index* adalah salah satu alat ukur kesejahteraan penduduk untuk mengukur pertumbuhan suatu negara. Untuk mengetahui seberapa besar kesejahteraan yang dicapai pemerintah untuk masyarakatnya, yaitu dengan melihat pembangunan manusia yang mana apabila SDM sudah memiliki nilai yang baik maka pengangguran akan berkurang dengan diikuti kenaikan pada produktifitas serta konsumsi, hal tersebut akan mengurangi angka kemiskinan yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel moderasi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dalam model random effect menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Berdasarkan analisis dalam model random effect menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Berdasarkan analisis uji MRA dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Berdasarkan analisis uji MRA dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat memperkuat hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Saran

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan agar dapat lebih diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti yang akan datang agar bisa lebih menyempurnakan penelitiannya, karena peneliti sendiri tentu dalam hal ini memiliki banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 5 tahun saja, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
2. Pembahasan variabel yang mungkin belum dapat menggambarkan indikator-indikator dalam pengentasan kemiskinan

Saran untuk penulis selanjutnya, untuk menambah jumlah variabel yang diteliti agar dapat lebih luas menggambarkan variabe-variabel yang dapat menggambarkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait dengan bagaimana usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi NTB.

Saran untuk pemerintah daerah Provinsi NTB kiranya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan guna untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianto Putra Arizandi, M., & Rochaida, E. (2017). Analisis Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1, 151–166.
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34.
- BPS NTB. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 - 2020*.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120.
- Faisal, M., & Ichsan, I. (2020). The Analysis of Economic Growth, Unemployment Rate and Inflation on Poverty Levels in Indonesia (Using the Vector Error Correction Model (VECM) Method). *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 03(02), 42–50.
- Garza-Rodriguez, J. (2018). Poverty and economic growth in Mexico. *Social Sciences*, 7(10).
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivaria dan Ekonometrika*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8 Ce). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. dan D. C. P. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Hauzan, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *10*(3), 211–222.
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(4), 1068–1080.
- Irmanelly, I., Afrizal, A., & Herlin, F. (2021). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruhnya terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2),

- Kartasasmita, G. (1993). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidessindo.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Atas kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kolibu, M.-, Rumate, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–14.
- Lewis, W. Arthur. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*.
- Mankiw. (2000). *Makro EEkonomi Edisi ke Enam*. Erlangga.
- Michael P. Todaro. (1978). *Pembangunan Ekonomi Di Duna Ketiga* (Edisi Kedu). Balai Aksara.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 77–89.
- Nainggolan, E. (2020). *Nainggolan*. 6(2), 89–99.
- Ningsih, F. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kota / Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2017). *Jurnal Ilmiah*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217.
- Primandari, N. R. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi , inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1–10.
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, 7(3), 416–444.
- Ruch, W., & Geyer, H. S. (2017). Public capital investment, economic growth and poverty reduction in South African Municipalities. *Regional Science Policy and Practice*, 9(4), 269–284.
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 1–13.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 59–71.
- Stevani Adinda Nurul Huda. (2020). Analysis of Trade, Unemployment, Government Contribution to Poverthy in Three Countries in the World. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, volume 24(Issue 1), 694–706.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (IKAPI (ed.); 26th ed.). Alfabeta, CV.
- Sukirno Sadano. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syata, I., & Darja, R. (2021). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Pada Tahun 2019. *Jurnal MSA (Matematika dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 9(1).
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: teori dan temuan empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2011). *Perekonomian Indonesia: kajian teoritis dan analisis empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Issue v. 2). Erlangga.
- Yulianti, A. (2020). *Pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan*. 13, 37–46.
- BPS NTB. (2020). Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 - 2020.

Internet

<https://www.republika.co.id/berita/q9q6uz430/tafsir-surat-ayat13#:~:text=Tahukah%20kamu%2C%20wahai%20Rasul%2C%20orang,zalim%20kepadanya%20dengan%20menahan%20haknya>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/02/112317326/infografik-angka-kemiskinan-era-soeharto-hingga-jokowi>

<https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/753/maret-2021---jumlah-penduduk-miskin-di-ntb-746-66-ribu-orang-.html>

LAMPIRAN

DATA PENELITIAN

Wilayah	Tahun	PDRB (X1)	IPM (X2)	TPT (X3)	Tingkat Kemiskinan (Y)
Lombok Barat	2017	4,94	66,37	3,28	3,32
Lombok Barat	2018	-0,89	67,18	3,22	3,22
Lombok Barat	2019	0,73	68,03	3,52	4,52
Lombok Barat	2020	-8,70	68,20	4,58	4,58
Lombok Barat	2021	1,62	68,61	3,32	3,32
Lombok Tengah	2017	5,44	64,36	2,90	2,90
Lombok Tengah	2018	2,20	65,36	2,98	2,98
Lombok Tengah	2019	1,53	66,36	2,35	2,44
Lombok Tengah	2020	-12,91	66,43	3,74	3,74
Lombok Tengah	2021	2,24	66,72	2,33	2,33
Lombok Timur	2017	5,40	64,37	3,64	3,64
Lombok Timur	2018	2,63	65,35	3,02	3,02
Lombok Timur	2019	2,30	66,23	3,35	3,35
Lombok Timur	2020	-10,54	66,30	4,17	4,17
Lombok Timur	2021	1,38	66,66	2,79	2,79
Sumbawa	2017	5,86	65,84	3,89	3,98
Sumbawa	2018	3,21	66,77	3,29	3,29
Sumbawa	2019	2,30	67,60	2,99	2,99
Sumbawa	2020	-12,25	67,61	4,01	4,01
Sumbawa	2021	-0,07	68,01	3,39	3,39
Dompu	2017	5,23	66,33	2,36	2,36
Dompu	2018	2,91	66,97	3,18	3,18
Dompu	2019	1,34	67,83	3,04	3,04
Dompu	2020	4,97	67,84	3,28	3,28
Dompu	2021	0,98	68,45	3,02	3,02
Bima	2017	5,14	65,01	1,55	1,55
Bima	2018	2,98	65,62	4,63	4,63

Bima	2019	1,63	55,37	2,79	2,79
Bima	2020	-6,63	66,30	2,89	2,89
Bima	2021	0,31	66,66	1,58	1,58
Sumbawa Barat	2017	-21,59	70,08	5,15	5,15
Sumbawa Barat	2018	-36,3	70,71	3,53	3,53
Sumbawa Barat	2019	-5,26	71,52	5,29	5,29
Sumbawa Barat	2020	33,97	71,63	5,50	5,50
Sumbawa Barat	2021	-2,55	71,85	5,52	5,52
Lombok Utara	2017	5,10	63,04	1,74	32,06
Lombok Utara	2018	-1,78	63,83	1,74	28,83
Lombok Utara	2019	3,41	64,49	1,99	29,03
Lombok Utara	2020	-16,00	64,42	3,01	26,99
Lombok Utara	2021	-0,63	64,77	1,75	27,04
Kota Mataram	2017	5,59	77,84	5,35	5,35
Kota Mataram	2018	2,98	78,43	6,49	6,49
Kota Mataram	2019	1,89	79,10	5,28	5,28
Kota Mataram	2020	8,82	78,91	6,83	6,83
Kota Mataram	2021	2,68	79,14	5,19	5,19
Kota Bima	2017	4,53	74,36	3,51	3,51
Kota Bima	2018	2,66	75,04	2,27	2,27
Kota Bima	2019	1,47	75,80	4,06	4,06
Kota Bima	2020	7,83	75,81	4,42	4,42
Kota Bima	2021	1,31	76,11	3,56	3,56